

STRATEGI PEMERINTAH KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KAMPUNG: STUDI DI WASUR, KECAMATAN MERAUKE, KABUPATEN MERAUKE

Nurul Uswatun Hasanah^{1*}, Anugerah Mulia Utami², Widyarti Widyarti³

¹ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

² Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

³ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

E-Mail:

¹ nuruluswatunhasanah@unmus.ac.id

² anugerahmuliautami@unmus.ac.id

³ widyarti@unmus.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Distrik Wasur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kampung serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan mencakup pembinaan di bidang ekonomi, hukum, agama, kesehatan, serta pelayanan publik. Meskipun partisipasi masyarakat cukup baik dalam pengambilan keputusan dan evaluasi, namun pelibatan dalam pelaksanaan pembangunan masih rendah. Faktor pendukung utama adalah kemauan masyarakat, sedangkan faktor penghambat utama adalah kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi yang lebih partisipatif dan pendekatan ekonomi yang lebih konkret untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kampung.

ARTICLE INFO

Keywords:

Strategi pemerintah kampung; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Kampung

Article History

Submitted:

15-06-2025

Accepted:

17-07-2025

Published:

18-07-2025

Corresponding Author:

Nurul Uswatun Hasanah, nuruluswatunhasanah@unmus.ac.id

1. INTRODUCTION

Pembangunan kampung merupakan fondasi dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, kampung (atau desa) menjadi unit terkecil pemerintahan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Konsepsi ini menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar objek pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kampung sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakatnya.

Menurut Khalim & Hernawati (2024), partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam setiap tahap pembangunan kampung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program. Namun, dalam praktiknya, pelibatan masyarakat dalam pembangunan tidak selalu berjalan optimal. Studi mereka di Kampung Wasur, Kecamatan Merauke, misalnya, menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan fisik masih rendah meskipun partisipasi dalam pertemuan musyawarah atau evaluasi program cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kampung-kampung masih bersifat parsial dan belum menyeluruh.

Dalam pembangunan kampung, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi indikator keberhasilan demokrasi lokal, tetapi juga menjadi syarat mutlak untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Setiawan et al., (2020) menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Namun, kenyataan di berbagai kampung di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masih menjadi tantangan utama. Seperti yang diungkapkan oleh Sembel et al., (2017), banyak masyarakat kampung yang masih bersifat pasif, kurang memiliki motivasi, atau merasa tidak punya kapasitas untuk ikut dalam proses pembangunan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, minimnya akses informasi, dominasi elite lokal, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi tersebut (Latif et al., 2019).

Dalam kasus Kampung Wasur, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kampung telah berupaya membina masyarakat dalam berbagai bidang, partisipasi masih kurang dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kampung Wasur telah menerapkan strategi pembinaan yang mencakup lima bidang utama: ekonomi, hukum, agama, kesehatan, dan pelayanan publik. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kampung secara menyeluruh.

Di bidang ekonomi, misalnya, pemerintah kampung memberikan bantuan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang menganggur atau kurang produktif. Menurut Purnawati & Putri (2019), strategi penguatan ekonomi masyarakat kampung sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi karena mampu mengurangi beban ekonomi rumah tangga, sehingga masyarakat memiliki waktu dan tenaga lebih untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Mardikanto dan Soebiato (2013) yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari strategi pembangunan partisipatif.

Selain ekonomi, pembinaan di bidang hukum juga menjadi strategi penting. Pemerintah Kampung Wasur mengadakan sosialisasi terkait hukum nasional dan hukum adat, seperti kampanye anti-narkoba dan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan temuan Halawa & Bali (2020) yang menekankan bahwa pemahaman hukum di tingkat kampung penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ketika masyarakat memahami aturan hukum, mereka lebih mudah diarahkan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan.

Di bidang agama, Pemerintah Kampung Wasur memfasilitasi kegiatan keagamaan rutin, seperti pengajian mingguan. Pendekatan spiritual ini dipandang efektif dalam membentuk karakter masyarakat yang berakhlak, memiliki rasa tanggung jawab sosial, dan peduli terhadap kepentingan umum. Handayani (2021) menyatakan bahwa pendidikan agama dapat memperkuat

nilai-nilai moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks pembangunan kampung.

Strategi lain yang penting adalah pembinaan di bidang kesehatan. Pemerintah Kampung Wasur menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis dan sosialisasi pola hidup sehat. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan untuk mendukung produktivitas mereka dalam kegiatan pembangunan. Konsep ini sejalan dengan paradigma kesehatan promotif dan preventif yang dicanangkan pemerintah pusat dalam program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) sebagaimana dijelaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2017. Menurut Sujani (2019), masyarakat yang sehat secara fisik dan mental lebih mampu untuk terlibat aktif dalam program-program pembangunan.

Hal yang tidak kalah penting adalah strategi di bidang pelayanan publik. Pemerintah kampung dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Raharjo (2021) menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Di era otonomi daerah, kepala kampung harus mampu menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Santoso (2005) menegaskan bahwa perubahan paradigma pelayanan publik dari dilayani menjadi melayani menjadi kunci utama keberhasilan pemerintahan lokal.

Dalam studi di Kampung Wasur, berdasarkan hasil observasi mencatat bahwa partisipasi masyarakat cenderung tinggi pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi pembangunan. Musyawarah kampung menjadi forum strategis untuk mendengar aspirasi masyarakat. Namun, pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik, partisipasi masih rendah karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan memiliki keterbatasan waktu. Fenomena ini juga ditemukan oleh Andriani et al., (2017) dalam studi mereka di Kampung Tumokang Baru, yang menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat kerap menjadi faktor penghambat keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik.

Dalam literatur pembangunan partisipatif, Lailiani (2017) menegaskan pentingnya pendekatan yang bersifat inklusif dan adaptif dalam melibatkan masyarakat. Pemerintah kampung harus mampu memahami karakteristik sosial dan ekonomi warganya agar strategi partisipasi yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Misalnya, bagi masyarakat yang tidak dapat menyumbangkan tenaga, partisipasi bisa dilakukan dalam bentuk lain seperti ide, pengawasan, atau kontribusi bahan bangunan.

Sementara itu, partisipasi masyarakat juga sangat ditentukan oleh persepsi dan sikap warga terhadap program pembangunan itu sendiri. Sahrir (2022) menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan era Industri 5.0, diperlukan strategi komunikasi yang efektif antara pemerintah kampung dan warganya agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai. Jika masyarakat merasa didengarkan dan aspirasinya diterima, mereka akan lebih antusias untuk ikut serta dalam pembangunan kampung.

Selain itu, penting pula untuk memperhatikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam merancang strategi partisipasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Laksana (2013), keberhasilan program kampung siaga di Yogyakarta tidak lepas dari pendekatan berbasis budaya lokal yang akrab dengan masyarakat. Pendekatan ini dapat menjadi model bagi kampung-kampung lain dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan partisipatif juga perlu mempertimbangkan faktor demografi. Studi Athifah (2018) menunjukkan bahwa variabel-variabel demografi seperti usia, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi masyarakat tidak boleh bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi demografis kampung masing-masing.

Dalam kerangka teoritik, Kartono dan Nurcholis (2016) menekankan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maka dari itu, partisipasi masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari transformasi

sosial, bukan sekadar pelibatan teknis dalam kegiatan proyek. Proses ini harus mengarah pada penguatan kapasitas masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan yang mandiri.

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa pembangunan kampung yang partisipatif hanya bisa dicapai jika ada sinergi antara pemerintah kampung, lembaga masyarakat, dan warga kampung. Pemerintah kampung tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus membuka ruang dialog yang luas dan membangun mekanisme kolaborasi dengan berbagai pihak. Ndraha (1990) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat hanya akan berhasil jika dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menghormati nilai-nilai lokal dan melibatkan semua elemen masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Alfiansyah et al., 2024; Moleong, 2007; Mulawarman et al., 2025). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut Faisal teknik pengambilan sampel purposive adalah pengambilan informan berdasarkan informan penelitian (Widyasari, 2022). Untuk mendapatkan dan melengkapi data-data penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Mulawarman, 2024; Taufik, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pemerintah Kampung

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, strategi juga merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dalam hal ini pemerintah kampung wasur.. Dalam hal ini pemerintah kampung wasur harus mampu melakukan strategi agar masyarakat dapat senantiasa ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang diadakan oleh pemerintah kampung wasur.

1) Bidang Ekonomi

Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan Kampung membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kampung (RKPDDes dan APBDDes). Keberhasilan pembangunannya dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasil sebuah pembangunan maka perlu tolak ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Mewujudkan Kampung sejahtera perlu langkah-langkah strategis yang terencana, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan monitoring perkembangan dan kemajuannya. Strategi untuk mewujudkan Kampung yang sejahtera mandiri diawali dengan terbitnya UU Kampung, yang memiliki paradigma baru dengan konsep Kampung membangun. Konsep Kampung membangun berarti kekuatan untuk membangun Kampung bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Campur tangan pemerintah kampung sangat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga dengan adanya kepedulian pemerintah kampung bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil wawancara di atas dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kampung Wasur sudah berusaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah sudah menjalankan salah satu dari program pembangunan non fisik dalam penanggulangan kemiskinan, yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

1. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan pemuktahiran data kemiskinan;
3. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
4. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Kampung yang menganggur, setelah menganggur, dan keluarga miskin;
5. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat Kampung Wasur, membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan terhadap masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga hal tersebut bisa menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menunjang perekonomian masyarakat.

2) Bidang Hukum

Masyarakat Kampung Wasur merupakan masyarakat hukum yang menghormati adat yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat ini, baik undang – undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral dan hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Kampung Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan

Pemerintahan Kampung Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Kampung Adat sesuai dengan susunan asli Kampung Adat atau dibentuk sesuai dengan prakarsa masyarakat Kampung Adat. Peraturan Kampung Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Kampung Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kampung Wasur selalu melestarikan hukum yang berlaku di dalam Kampung yang sudah terbentuk pada zaman dahulu sampai saat ini, dan juga harus mengikuti perkembangan peraturan Undang-Undang yang berlaku sekarang ini. Maka dalam hal tersebut pemerintah selalu aktif ber sosialisasi terhadap masyarakat dengan hukum yang berlaku di dalam Undang – Undang seperti sosialisasi hukum anti narkoba, sosialisasi hukum perlindungan anak dan hukum lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat Kampung Wasur, membuktikan bahwa pemerintah memang benar melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum. Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan wawasan, kemampuan dan menambah pengetahuan terhadap hukum yang berlaku baik itu dalam undang – undang, peraturan pemerintah, maupun hukum adat.

3) Bidang Agama

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa cita – cita bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita – cita tersebut terealisasi dengan ditetapkannya Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang”.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah keberadaan pendidikan agama yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam usaha menyeimbangkan pengetahuan dan pembentukan akhlak seseorang. Secara lengkap, pendidikan agama merupakan sesuatu hal yang sangat perlu dan penting untuk dijadikan suatu kebutuhan spiritual dan tingkah laku manusia. Karena memang pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak, dan pendidikan akhlak menuju kepada sikap dan tingkah laku manusia yang didasari atas nama agama.

Pemerintah pada umumnya memberi kesempatan belajar kepada semua lapisan masyarakat, dan pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan di laksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan anak bangsa di perlukan kerjasama antara tiga komponen yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menjadikan masyarakat Indonesia cerdas dalam dalam menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup yang terjadi. Begitu juga ketika membahas peran Pemerintah Kampung dalam pembangunan segala aspek kehidupan masyarakat hendaknya memperhatikan potensi yang ada dan juga kebutuhan dari masyarakatitu sendiri, tanpa mengabaikan aturan – aturan yang ada.

Begitu juga halnya dengan masalah pendidikan agama, Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, mendukung sepenuhnya pelaksanaan proses pendidikan agama di Kampung baik formal maupun non formal, bahkan Pemerintah Kampung menjadi penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan segala macam bentuk aktifitas keagamaan yang di lakukan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Wasur dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kampung Wasur sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat di bidang agama yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat.

Pemerintahan Kampung merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat Kampung / kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang –Undang yang berkaitan dengan pemerintahan Kampung yang mengatur tentang pemerintahan Kampung, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Kampung sebagai penanggung jawab keseluruhan berjalannya roda pemerintahan Kampung mempunyai peran yang sangat besar, selain itu harapan masyarakat terhadap Pemerintah Kampung sangat besar, bisa mengayomi dalam berbagai macam bentuk aktifitas, organisasi maupun memberi pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam agama.

4) Bidang Kesehatan

Paradigma sehat sebagai sudut pandang upaya kesehatan kini lebih mengutamakan promotif, preventif dan dikuatkan pelaksanaannya dengan inpres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), dalam konsep paradigma sehat sesungguhnya adalah menempatkan kewajiban masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Pembinaa di bidang kesehatan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh mayarakat sehingga mampu membentuk tingkat kesehatan masyarakat menjadi derajat yang sebaik – baiknya. Secara sosial dan ekonomis hal ini dapat dijadikan sebagai modal atau investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Seluruh unsur penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat yang sehat. Tidak luput pula peran serta aktif dari masyarakat harus dilibatkan secara optimal untuk mengubah dan memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungannya, perilaku inilah yang menjadi pintu masuk terciptanya masyarakat yang sehat. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan sebuah ide diperlukannya sebuah konsep percepatan pembangunan kesehatan yang menjadikan Kampung sehat sebagai basisnya.

Dari hasil wawancara dengan PJ Kepala Kampung Wasur dapat saya ambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kampung Wasur sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan. Dengan terciptanya masyarakat yang sehat maka akan meningkatkan pula partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kampung Wasur, membuktikan bahwa Pemerintah Kampung sudah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan. Dalam menjalankan program masyarakat hidup sehat Pemerintah Kampung Wasur perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.

5) Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan publik yang berkualitas pada hakekatnya adalah pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Kewajiban pemberian pelayanan tersebut mencakup pelayanan yang bersifat kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan, maupun pelayanan terkait dengan barang publik, jasa publik, pelayanan administratif serta berbagai jenis pelayanan lainnya. Dalam konteks pemerintahan Kampung, dengan semakin kuatnya otonomi pemerintahan Kampung maka otorisasi pelayanan publik pemerintahan Kampung harus segera diwujudkan.

Kewenangan kepala Kampung dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemberian otonomi Kampung yang diserahkan oleh Negara melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti kepala Kampung diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip otonomi dilakukan secara nyata dan bertanggung – jawab, yang dimaksud nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang. Yang dimaksud otonomi yang bertanggung-jawab adalah dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. Kewenangan kepala Kampung diperoleh dari rakyat melalui pemilihan kepala Kampung dalam arti hak otonomi Kampung yaitu hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diserahkan kepada kepala Kampung untuk dilaksanakan, sehingga tanggung jawab tujuan otonomi berada dipundak kepala Kampung sebagai pemimpin Kampung selama enam tahun periode masa jabatan.

Peranan Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sejak reformasi dituntut meningkatkan pelayanan public menjadi lebih baik dari cara-cara sebelumnya, bahwa paradigma pelayanan publik dirubah dari dilayani menjadi melayani. Sikap Kepala Kampung yang bersifat ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk pada peran kepala Kampung dalam pelayanan publik, kepala Kampung cenderung korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala Kampung. Kenyataan ini bukan rahasia lagi, masyarakat pada umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa kegagalan pembangunan nasional diakibatkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghambat tujuan pelayanan publik mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sehingga kepala Kampung dalam pelayanan publik harus melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani yang menjadi harapan masyarakat pada era reformasi ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Masyarakat Kampung Wasur, membuktikan bahwa Pemerintah Kampung sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kampung Wasur. Tanggung jawab untuk melayani masyarakat atau pelayanan publik diwujudkan oleh kepala Kampung dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara formal adalah sah menjadi suatu yang bersifat wajib atau menjadi keharusan seorang kepala Kampung melayani kepentingan masyarakat. Kewajiban pelayanan publik oleh kepala Kampung formal dan sah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi keinginan bersama dalam pengaturan dan penataan kepentingan- kepentingan individu atau kelompok masyarakat Kampung membangun kehidupan yang lebih baik adalah tujuan pelayanan publik.

3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

3.2.1 Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan Kampung Wasur

Pengambilan keputusan adalah langkah yang paling utama dalam memberikan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan memberikan peluang yang maksimal terhadap masyarakat. pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga masyarakat akan selalu diikuti sertakan atau dilibatkan dalam suatu diskusi maupun rapat. Hal tersebut dikarenakan sebuah pembangunan akan berhasil jika ada partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

Pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat dari sejak rencana awal pengambilan keputusan telah dilibatkan dan diikutsertakan dalam proses pembangunan. masyarakat harus ada keinginan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan. dengan adanya keinginan tersebut sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mengambil keputusan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang sesuai dengan planning atau rencana awal.

Pada tahap pengambilan keputusan di Kampung Wasur yaitu dengan diadakannya rapat Kampung, semua berbagai permasalahan dan rencana-rencana program pemerintah khususnya Pemerintah Kampung Wasur dibicarakan dalam rapat tersebut termasuk membahas mengenai masalah pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kampung Wasur selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan rapat yang diadakan oleh Pemerintah Kampung Wasur, meskipun masih banyak masyarakat yang datang terlambat bahkan tidak hadir dalam kegiatan rapat tersebut.

3.2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Wasur

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan tenaga. Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini harus melibatkan semua pihak, harus bekerjasama dan bertanggungjawab agar semua tujuan yang telah direncanakan dan disepakati sebagai hasil dari keputusan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dalam program pembangunan Kampung, Pemerintah Kampung harus mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya dapat menikmati hasil pembangunan saja, akan tetapi masyarakat pun ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai target atau tidak. Disamping itu, agar terciptanya suasana kebersamaan dan keterbukaan, sehingga berharap agar pembangunan yang sudah direalisasikan dapat di pertahankan dan ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kampung Wasur bahwa Pemerintah Kampung sudah berusaha dengan baik untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung, namun kembali lagi kepada masyarakat nya yangt memang masih ada beberapa yang tidak mau melibatkan diri dalam pelaksanaan pembangunan Kampung tersebut.

3.2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan Kampung Wasur

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan pembangunan yang bisa dicapai. dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil pembangunan Kampung yang telah ditetapkan, oleh karena itu masyarakat harus ikut andil dalam setiap rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengambilan manfaat dalam pembangunan ini harus disalurkan dan dirasakan oleh orang-orang yang ikut berpartisipasi dan bekerjasama didalamnya. Oleh karenanya, Pemerintah Kampung harus mengkaji ulang siapa saja orang-orang yang harus menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.

3.2.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan Kampung Wasur

Evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadaan tersebut. Dengan kata lain evaluasi adalah upaya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara program yang dilaksanakan dengan hasil yang dicapai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara relasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Suatu pembangunan pada dasarnya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, baik dalam pemberian input, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, peran serta aktif setiap individu dalam masyarakat penerima manfaat akan sangat menentukan keberhasilan perencanaan program. Sosialisasi merupakan langkah awal pemberian informasi terhadap masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana cara melaksanakan program pembangunan dengan baik agar mencapai keberhasilan dari mulai tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap pengambilan manfaat sampai pada tahap evaluasi.

Dalam program pembangunan Kampung pada tahap evaluasi, hal ini untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif dalam pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi tersebut akan menjadi sangat penting pada proses akhir dari program pembangunan Kampung tersebut. Evaluasi program dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang masyarakat rumuskan jika program tersebut sudah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Kampung Wasur sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan mengenai Strategi Pemerintah Kampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kampung (Studi Di Kampung Wasur, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke) sebagai berikut:

Strategi Pemerintah Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kampung dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini terlihat dari 5 indikator seperti (a) bidang ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (b) Bidang hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi anti narkoba kepada masyarakat. (c) Bidang Agama yaitu dengan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan pengajian setiap satu kali dalam satu minggu yang dilakukan pada hari Jumat. (d) Bidang kesehatan yaitu pada saat kegiatan posyandu pemerintah menyediakan pemenuhan gizi terutama bagi balita dan ibu hamil, dan penyediaan layanan pemeriksaan gratis dan obat gratis untuk masyarakat lanjut usia. (e) Bidang pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kampung dapat dilihat dari 4 indikator seperti (a) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yaitu masyarakat ikut berpartisipasi setiap rapat Kampung yang diadakan oleh pemerintah. (b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Wasur. (c) Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan, yaitu masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya dan menjaga hasil pembangunan tersebut. (d) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan, yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam tahap evaluasi hasil pembangunan Kampung Wasur.

REFERENCE

- Alfiansyah, M. W., Switrayana, I. N., & Mulawarman, L. (2024). Peran Business Intelligence Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 13-19.
- Andriani, N. M. A., Rares, J. J., & Tampi, G. B. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Athifah, A. (2018). *Pengaruh Variabel-Variabel Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa (Periode Tahun 2008–2016)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Halawa, E., Bali, F. P., & Agung, U. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Governance Opinion*, 5.
- Handayani, S. (2022). Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa. *Sawala*, 2(2), 61-73.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalim, A., & Hernawati, Y. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kampung Arab Panjunan Kota Cirebon. *ECo-Buss*, 7(1), 435-447.
- Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Kampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790-798.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di desa bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 1(1), 56-66.
- Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.
- Mardikanto, T. dan Soebiato P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mulawarman, L. (2024). Menggali Kekuatan dan Peluang Mumpreneur: Studi Kasus pada Usaha Kecil Rumahan di Pulau Lombok. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(4), 81-86.
- Mulawarman, L., Alfiansyah, M. W., & Switrayana, I. N. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Kreativitas Wirausahawan Pemula. *JAIM: Jurnal Aliansi Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 17-22.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipt. Jakarta

- Purnawati, L., & Putri, O. I. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung (Studi Pada Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 12(1), 70-92.
- Raharjo, M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Sahrir, R. (2022). *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Tantangan Industri 5.0*.
- Santoso, 2005, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerindministrasi Publik*, 3(02), 251-270.
- Sujani, M. R. (2019). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 483-497.
- Taufik, M. (2024). Strategi Pengembangan Produk Berbasis Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 20-24.
- Widyasari, C. (2022). *Analisis Hasil Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Man Program Keagamaan (Manpk) Di Man 1 Yogyakarta*.